

AKSESIBILITAS PETANI KECIL PADA SUMBER KREDIT PERTANIAN DI TINGKAT DESA: STUDI KASUS PETANI PADI DI NUSA TENGGARA BARAT

ADE SUPRIATNA¹⁾

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor (16114), Jawa Barat, Indonesia
Email: caser@indosat.net.id

ABSTRACT

One problem in rice production at village level is a lack of capital and credit has become a part of farm economy. This study was conducted in 2003 and took place in Nusa Tenggara Barat (NTB). The objectives of study were: (i) to identify the existing sources of agricultural credit at the village level, (ii) to identify the sources of credit to which small farmers have been access to meet their financial needs, and (iii) to identify the ideal scheme of credit that suitable for small farmers. The results shown that the oldest sources of loan at the village level were the informal institutions such as daily Bank, money lender, rice trader, input trader, and rice miller. The formal institutions were established later namely KUD in 1977, BPR in 1988, BRI Unit Desa in 1996, and Pawnshop in 2001. Small farmers and landless farmers were generally access to the informal institutions. The scheme of informal institutions provided a loan at high interest rate, but the other ones were very suitable for small farmers, such as no collateral, simple procedure, and fast to obtain. Otherwise small farmers could not access to the formal institutions that served a loan at low interest rate, because of: (a) they did not have any collateral required by the scheme, especially land certificate, (b) monthly repayment of credit was not suitable for rice farm that have a seasonal cycle of production, and (c) they were unfamiliar with complex procedure of credit. A lot of small farmer hopes a credit with collateral of moving goods (no land sertifice), interest rate from 18 to 24 percent per year, credit in cash, and short term credit.

Keywords: Small Farmers, Rice, Credit, Accessibility

ABSTRAK

Suatu permasalahan dalam produksi padi di tingkat desa adalah kekurangan modal dan kredit menjadi bagian tak terpisahkan dari perekonomian petani. Studi ini dilaksanakan tahun 2003 yang mengambil lokasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuan studi yaitu: (i) Mengidentifikasi keberadaan sumber-sumber kredit pertanian pada tingkat desa, (ii) Mengidentifikasi sumber kredit pada mana petani kecil telah memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka, dan (iii) mengidentifikasi skema ideal kredit yang sesuai untuk petani kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber-sumber dana tertua pada tingkat desa adalah kelembagaan informasl, seperti Bank Harian, rentenir, pedagang beras, pedagang sarana produksi, dan penggilinmgan padi. Kelembagaan formal yang terbentuk belakangan adalah KUD dalam tahun 1977, BPR dalam 1988, BRI Unit Desa dalam tahun 1996, dan pegadaian (pawnshop) dalam 2001. Petani kecil dan petani tanpa tanah (penyakap) umumnya mengakses kelembagaan informal. Skema kelembagaan informal menawarkan pinjaman pada tingkat bunga tinggi, tetapi sangat sesuai untuk petani kecil, seperti tanpa jaminan, prosedur sederhana, dan cepat realisasi. Sebaliknya petani kecil tidak dapat mengakses kelembagaan formal yang telah menyediakan pinjaman pada tingkat bunga rendah, karena antara lain: (a) mereka tidak memiliki suatu jaminan yang diperlukan oleh skema, terutama sertifikat tanah, (b) Pembayaran kembali kredit setiap bulan tidak sesuai untuk usahatani padi yang memiliki siklus produksi musiman, dan (c) mereka tidak akrab dengan prosedur kredit yang berbelit-belit. Banyak petani kecil berharap kredit dengan jaminan barang-barang bergerak (bukan sertifikat tanah), tingkat suku bunga 18-24 persen per tahun, kredit dalam bentuk tunai, dan kredit jangka pendek.

Kata kunci: Petani Kecil, Padi, Kredit, Aksesibilitas

¹⁾ Peneliti pada Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBPPTP), Badan Litbang Pertanian.

PENDAHULUAN

Ciri khas dari kehidupan petani adalah perbedaan pola penerimaan, pendapatan, dan pengeluarannya. Hasil produksi hanya diterima petani setiap musim sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak seperti kematian, pesta perkawinan dan selamatan lain. Petani kaya dapat menyimpan hasil panen untuk kemudian dijual sedikit demi sedikit pada waktu diperlukan sedangkan petani gurem (tidak berlahan dan penguasaan lahan sempit) masih kesulitan untuk menyimpan hasil (Mubiyarto, 1973).

Sekitar 70 persen petani padi Indonesia terutama petani-petani gurem diklasifikasikan sebagai masyarakat miskin berpendapatan rendah (Suryana, *dkk.*, 2001). Keberadaan kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani untuk tujuan produksi, pengeluaran hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual dan untuk pertemuan sosial lainnya. Dikarenakan penguasaan lahan tergolong sempit, upah yang mahal dan kesempatan kerja terbatas di luar musim tanam, sebagian besar petani tidak dapat memenuhi biaya hidupnya dari satu musim ke musim lainnya tanpa pinjaman. Kredit sudah menjadi bagian hidup dan ekonomi usahatani, bila kredit tidak tersedia tingkat produksi dan pendapatan usahatani akan turun drastis. Sesuai pendapat Mears, L.A. (1961) bahwa kredit benar-benar dibutuhkan oleh petani padi Indonesia untuk beberapa tujuan, yaitu biaya hidup sehari-hari sebelum hasil panen terjual dan untuk pertemuan –pertemuan sosial yang sudah menjadi kebiasaan.

Masalah utama dalam penyediaan kredit ke petani gurem adalah adanya jurang pemisah antara penyaluran dengan penerimaan kredit. Banyak lembaga permodalan dengan berbagai skim kreditnya ditawarkan ke petani, tetapi pada kenyataannya hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu sedangkan petani kecil masih tetap kesulitan. Untuk perbaikan pelayanan kredit, perlu dilakukan studi mengenai aksesibilitas petani kecil terhadap sumber perkreditan. Penelitian ini secara rinci bertujuan untuk; (a) mengidentifikasi sumber-sumber kredit petanian yang ada di tingkat petani, (b) mengidentifikasi sumber kredit yang diakses oleh petani dan (c) mengidentifikasi karakteristik skim kredit yang diharapkan oleh petani. Hasil penelitian merupakan informasi penting dalam merumuskan kebijakan permodalan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menyentuh sampai petani kecil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2003 dan berlokasi di Propinsi Nusa Tenggara (NTB). Studi menggunakan metode survei terstruktur, menggunakan daftar pertanyaan. Data primer dikumpulkan dari 25 petani padi, dan lembaga-lembaga kredit formal dan informal yang ada di tingkat petani yaitu Bank komersial, koperasi, pegadaian, pedagang input

produksi, pedagang hasil pertanian, penggilingan padi dan pelepas uang. Data sekunder dikumpulkan dari Dinas/Instansi terkait seperti Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas koperasi dan UKM dan laporan Lembaga penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, keragaan sumber kredit, aksesibilitas petani dan karakteristik skim kredit yang diharapkan petani diuraikan menurut hasil interpretasi data tabulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Kredit Pertanian di Tingkat Desa

Keberadaan sumber kredit sangat penting dalam pengembangan produksi padi terutama untuk petani berlahan sempit dan petani tidak berlahan. Kredit digunakan baik untuk tujuan produksi, kegiatan ekonomi lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Tabel 1 menginformasikan bahwa sudah banyak lembaga yang menyediakan kredit di tingkat desa, berdasarkan organisasinya dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, yaitu: (a) lembaga kredit informal terdiri atas Bank keliling dikenal dengan nama lokal "*Bank jongkok*", pedagang hasil pertanian, pelepas uang, pedagang sarana produksi dan penggilingan padi; (b) lembaga kredit formal terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit Desa dan lembaga pegadaian; dan (c) kredit program pemerintah terdiri atas Usaha Pelayanan Kredit Desa (UPKD) dana APBD dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dana APBN.

Lembaga kredit yang sudah lama terbentuk adalah lembaga informal, lembaga ini tidak dibangun oleh pemerintah tetapi berdiri sendiri sejalan dengan tumbuhnya permintaan dari petani. Yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian kredit lembaga ini adalah aspek kepercayaan, kredit diberikan kepada para petani yang dipercaya melakukan pembayaran cukup lancar. Suku bunga lembaga informal sangat tinggi, yaitu Bank keliling (80%), pedagang hasil dan pelepas uang (60%) dan kios saprotan serta penggilingan padi (24%) per tahun. Pada tahun 2002, kisaran nilai kredit yang disalurkan lembaga kredit informal antara Rp.1,5 juta sampai Rp.10 juta dengan jumlah peminjam antara 15 sampai 25 orang. Untuk mempercepat pembangunan ekonomi pedesaan dan menghindari masyarakat, terutama petani gurem, terjerumus ke dalam jeratan lembaga kredit informal, maka pemerintah memfasilitasi pembangunan lembaga kredit formal yang menyediakan suku bunga rendah, yaitu berturut-turut KUD didirikan pada tahun 1977, BPR tahun 1988, BRI Unit Desa tahun 1996 dan lembaga pegadaian tahun 2001.

BRI Unit Desa merupakan Bank primer diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor pertanian termasuk aspek pemasaran dan prosesing hasil melalui menyediakan bantuan dalam bentuk kredit umum pedesaan (kupedes) dan kredit konsumsi. Skim kupedes

merupakan skim multiguna, baik untuk modal usaha maupun konsumtif, besar plafond maksimum BRI Unit Desa Rp.50 juta sedangkan untuk kredit diatas Rp.50 juta harus melalui kantor BRI kantor cabang yang umumnya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. Dana kredit yang disalurkan tahun 2003 mencapai Rp.1.200 juta dengan jumlah debitor 1.044 orang. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan Bank pemerintah lokal, menyediakan kredit dalam skim investasi dan konsumsi dengan prosedur perolehan kredit lebih sederhana dibandingkan Bank komersial lainnya tetapi tingkat bunga cukup tinggi yaitu 36 persen per tahun. Lembaga ini mampu menyalurkan dana sekitar Rp.400 juta teradap 423 orang debitor.

Tabel 1. Keberadaan Lembaga Kredit Pertanian di Tingkat Desa

Jenis Lembaga kredit	Tahun berdiri	Jenis skim	Kinerja lembaga kredit			
			Jangkauan pelayanan	Nilai kredit Tersalur (Rp.1.000)	Jumlah Peminjam ¹⁾ (Orang)	Nilai pinjaman Per orang (Rp.1.000)
1. Lembaga kredit informal						
Bank keliling	1967	-	3 desa	1.500	20	75,0
Pedagang hasil pertanian	1970	-	2 desa	4.000	20	200,0
Pelepas uang	1977	-	1 desa	2.500	15	167,0
Pedagang sarana produksi	1977	-	1 desa	10.000	20	500,0
Penggilingan padi (RMU)	1978	-	1 desa	3.750	25	150,0
2. Lembaga kredit formal						
KUD	1977	Simpan-pinjam	5 desa	8.000	160	50,0
BPR	1988	Investasi dan konsumsi	3 kecamatan	400.000	423	946,0
BRI Unit Desa	1996	Kupedes dan konsumsi	2 kecamatan	1.200.000	1.044	1.149,0
Pegadaian	2001	-	2 kecamatan	1.600.000	600	2.667,0
3. Kredit program						
UPKD ²⁾	1990	Program	2 desa	450.000 ³⁾	659	683,0
KKP ⁴⁾	2000	Program	1 desa	28.000 ⁵⁾	38	737,0

¹⁾ Untuk lembaga kredit formal tidak dibedakan antara peminjam petani dan bukan petani

²⁾ Untuk pengembangan tanaman pangan, ternak dan kegiatan ekonomi desa lainnya

³⁾ Terdiri atas 34 kelompok tani dengan total anggota 659 petani

⁴⁾ Untuk petani berlahan sempit ($\leq 0,5$ ha)

⁵⁾ Terdiri atas satu kelompok tani dengan total anggota 38 petani

Dirjen Koperasi (1978) menginformasikan bahwa KUD merupakan lembaga yang diharapkan dapat mendorong berbagai aktivitas ekonomi di pedesaan, melalui: (a) menyediakan pelayanan kredit usahatani, (b) menyediakan dan mendistribusikan input produksi, (c) pengolahan dan pemasaran hasil dan (d) pelayanan ekonomi desa lainnya. Namun pada kenyataannya di lapangan, kinerja KUD mengalami kemunduran karena terjadi kemacetan pengembalian kredit KUT, yaitu sekitar 89 persen dari total kredit yang disalurkan. KUD sekarang hanya melayani pengadaan dana dalam bentuk kredit simpan-pinjam untuk para anggotanya, jumlah dana yang disalurkan Rp.8 juta dengan jumlah peminjam 160 orang. Program KUT mengalami kegagalan karena; (a) melibatkan terlalu banyak lembaga atau agen sehingga menimbulkan birokrasi berlebihan, (b) banyak penerima kredit bukan petani, (c) sering terjadi penyimpangan bantuan baik dalam jumlah maupun kualitasnya dan (d) terjadinya kelebihan produksi (*over production*) dan penurunan harga jual padi. Kegagalan program KUT tidak hanya menimbulkan masalah kemacetan dana tetapi juga lebih jauh yaitu turunnya kinerja lembaga-lembaga yang sudah terbentuk seperti koperasi dan kelompok tani. Hal ini sesuai dengan pendapat Richardson, *et al.* (1982) yang menyatakan bahwa ketika kredit salah penggunaan, permasalahan akan timbul lebih besar dibandingkan apabila kredit tidak digunakan sama sekali.

Program KKP dibiayai oleh pemerintah untuk mendorong program intensifikasi padi. Skim kreditnya merupakan kombinasi antara skim kredit lembaga formal (bunga rendah) dengan lembaga informal (prosedur mudah dan agunan sertifikat tanah cukup berasal dari pengurus kelompok tani). Beberapa keuntungan dari skim kredit program pemerintah, yaitu: (a) menyediakan bantuan kredit dengan suku bunga rendah, (b) menyediakan kredit jangka pendek (musiman) dan pembayaran dapat ditunda pada musim berikutnya apabila terjadi kegagalan panen, (c) memperbolehkan agunan sertifikat tanah dan bangunan berasal dari salah satu pengurus kelompok tani dan (d) melayani petani dengan prosedur administrasi yang sederhana yaitu melalui kelompok tani. UPKD dibentuk pada tahun 1990 ditujukan untuk pengembangan produksi komoditas pangan dan sayuran, ternak dan kegiatan ekonomi desa lainnya. Nilai bantuan yang tersalurkan Rp.450 juta tersebar di 34 kelompok tani dengan jumlah anggota 659 petani.

Program KKP dan UPKD disamping mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan petani juga untuk mendorong kelompok tani untuk lebih aktif, terutama dalam mengelola kredit sehingga mereka dan para anggotanya dapat belajar untuk akses ke lembaga kredit formal. Hal ini sesuai dengan pendapat Umali, *et al.* (1978) bahwa kelompok tani merupakan tahapan awal agar petani kecil menjadi lebih familier dengan prosedur kredit formal yang lebih rumit. Ini dapat ditempuh melalui partisipasi aktif dari seluruh anggotanya mulai dari penyusunan sampai permohonan kredit kelompok.

Sumber Kredit yang Diakses Petani

Karakteristik skim kredit terdiri atas nilai plafond, jenis agunan, bentuk kredit, lama pinjaman, tingkat suku bunga dan bentuk serta cara pembayaran. Tabel 2 menginformasikan, bahwa BRI Unit Desa dan BPR menyediakan kredit jangka pendek dan jangka menengah dengan tingkat bunga antara 24-26 persen per tahun dan kredit dikembalikan secara bulanan. Lembaga ini menetapkan agunan berupa sertifikat tanah dan bangunan, daftar gaji, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) and deposito.

Table 2. Karakteristik Skim menurut Lembaga Kredit Pertanian di Tingkat Petani

Jenis lembaga kredit	Karakteristik skim kredit						
	Nilai Plafond (Rp.1.000)	Jenis agunan	Bentuk kredit	Lama pinjaman (Bulan)	Tingkat bunga (%/tahun)	Bentuk pengembalian	Cara pengembalian
1. Lembaga Informal							
Bank keliling	10 - 500	-	Uang	3,3	80	Uang	Harian
Pedagang hasil	100 – 1.500	-	Uang	1 - 4	60	Uang/hasil	Musiman
Pelepas uang	250 - 600	-	Uang	1 - 12	60	Uang	Musiman
Kios saprotan	100 - 500	-	Uang/input	6 - 12	24	Uang	Musiman
Penggilingan padi (RMU)	100 - 300	-	Uang	1 - 4	24	Uang/hasil	Musiman
2. Lembaga formal							
KUD	50 - 500	-	Uang	2 - 3	60	uang	Bulanan
BPR	250 - 50.000	A,B	Uang	3 - 36	36	Uang	Bulanan
BRI Unit <i>Desa</i>	50 – 50.000	A,B	Uang	6 - 60	24	Uang	Bulanan
Pegadaian	10 – 5.000	C	Uang	4	30 - 42	Uang	15 hari sekali
2. Kredit program							
UPKD	5.000 – 9.000	A ²⁾	Uang	6 - 10	24	Uang	Musiman
KKP	500 - 700	A ²⁾	Uang	6	18	Uang	Musiman

¹⁾ Jenis agunan: A = Sertifikat lahan dan bangunan
 B = Surat berharga seperti daftar gaji, BPKB kendaraan, deposito dll..
 C = Barang bergerak seperti sepeda motor, TV, perhiasan dll.

²⁾ Cukup sertifikat pengurus kelompok

Pegadaian menyediakan pinjaman jangka pendek, tingkat bunga antara 30 sampai 42 persen per tahun, pembayaran dilakukan 15 hari sekali selama empat bulan dan jenis agunannya merupakan barang bergerak seperti sepeda motor, TV, perhiasan dan lainnya. Agunan dapat dilelang oleh rumah gadai bila tidak ditebus sesuai waktu jatuh tempo, yaitu maksimal enam bulan. Jumlah pinjaman yang diberikan maksimal sebanyak 64 persen dari harga agunan atau 80 persen dari harga eksekusi. Lembaga kredit formal yang tidak membutuhkan agunan hanya KUD, petani cukup menjadi anggota KUD maka mereka sudah bisa mengajukan permohonan kredit simpan pinjam, tetapi tingkat suku bunganya cukup tinggi 60 persen per tahun dan pinjaman dikembalikan secara bulanan.

Untuk dapat meminjam ke lembaga kredit informal, petani tidak perlu mengeluarkan agunan tetapi tingkat suku bunga yang ditetapkan sangat tinggi, yaitu berturut-turut Bank keliling (80%), pedagang hasil dan pelepas uang (60%), kios saprotan dan penggilingan padi (24%) per tahun. Pedagang hasil dan pemilik penggilingan padi memberikan pinjaman kredit dengan dua tujuan, yaitu disamping mendapatkan keuntungan ekonomi juga untuk mengikat petani agar secara tidak langsung petani akan menjual hasil panen kepada mereka.

Dari berbagai lembaga permodalan yang ada, skim kredit program (UPKD dan KKP) merupakan skim kredit yang paling sesuai dengan karakteristik petani kecil. Lembaga ini menerapkan suku bunga cukup rendah antara 18 sampai 24 persen per tahun, agunan sertifikat dapat diwakili kepunyaan pengurus kelompok, kredit diberikan dalam bentuk uang pinjaman, kredit dikembalikan musiman setelah panen dan permohonan kredit dilakukan oleh pengurus kelompok tani langsung dari Bank yang ditunjuk.

Table 3. Sumber Kredit Pertanian yang Diakses Petani Gurem.

Sumber Kredit pertanian	Petani Peminjam (%)	Bentuk kredit	Nilai (Rp.1.000/ha)	Frekuensi kontak (Kali)	Lama permohonan (Hari)	Penggunaan kredit ¹⁾	Lama pinjaman (Bulan)	Bentuk pembayaran
1. Pedagang saprotan	20,0	Uang/input	250,0	1	1	A	2 - 4	Uang
2. Penggilingan padi	20,0	Uang	300,0	1 - 3	1 - 3	A,B	2 – 6	Uang/hasil
3. UPKD	16,0	Uang	750,0	1 - 3	15 - 30	A	6	Uang
4. KKP	8,0	Uang	1.320	3 - 6	30 - 60	A,B	6	Uang
5. Pedagang hasil	8,0	Uang	260,0	1	1	A,B	2 - 4	Uang/hasil
6. Pegadaian	4,0	Uang	160,0	1	1	A,B	4	Uang
7. Pelepas uang	4,0	Uang	590,0	1 - 3	1 - 3	A,B	2 - 6	Uang

¹⁾ A= Biaya produksi

B= konsumsi dan kebutuhan lainnya

Syukur, *dkk.* (1990) menginformasikan bahwa setiap lembaga permodalan akan mempunyai segmen pasar sendiri-sendiri tergantung kepada karakteristik skim kreditnya. Petani sebagai peminjam akan memilih jenis skim kredit yang sesuai dengan tipe usahanya. Tabel 3 menginformasikan bahwa dalam pembiayaan usahatani, delapan puluh persen petani gurem disamping menggunakan modal sendiri (*internal finance*) juga melakukan pinjaman kredit (*external finance*). Mereka pada umumnya hanya akses kepada lembaga-lembaga kredit informal dan kredit program sedangkan lembaga kredit formal yang diakses hanya lembaga pegadaian. Sumber kredit pertanian yang banyak diakses petani kecil berturut-turut adalah pedagang saprotan (20%), penggilingan padi (20%), UPKD (16%), KKP (8%), pedagang hasil pertanian (8%), pelepas uang (4%) dan pegadaian (4%). Sebenarnya para petani menghendaki untuk ikut kredit program (UPKD dan KKP) tetapi karena kemampuan keuangan pemerintah terbatas maka jumlah petani peserta juga dibatasi. Skim kredit program sangat sesuai karena suku bunganya rendah, agunan sertifikat tanah dapat diwakili oleh sertifikat milik pengurus kelompok tani dan pengembalian pinjaman dilakukan secara musiman.

Lembaga kredit formal umumnya menyediakan dana dengan suku bunga rendah, yaitu BRI Unit Desa dan BPR masing-masing 24 persen dan 36 persen per tahun. Namun demikian, petani kecil tidak bisa akses dikarenakan beberapa kendala: (a) petani tidak memiliki agunan sertifikat tanah, (b) pembayaran secara bulanan tidak sesuai dengan usahatani padi yang memberikan siklus produksi musiman dan (c) petani kecil umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit. Sekarang ini, lembaga formal hanya dimanfaatkan oleh kelompok petani kaya seperti pemilik penggilingan padi, pedagang input produksi dan pelaku bisnis lainnya. Sebaliknya, petani kecil hanya akses kepada lembaga kredit informal karena tidak mensyaratkan agunan dan prosedur perolehan sangat mudah, meskipun lembaga ini menetapkan suku bunga yang tinggi antara 24 sampai 80 persen per tahun.

Sesuai pendapat Umali, *et al.* (1978) bahwa salah satu alasan utama petani kurang akses ke lembaga formal adalah keuntungan tingkat bunga rendah yang diberikan dikalahkan oleh lebih banyaknya waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan kredit. Disamping itu, lembaga informal juga memberikan beberapa keuntungan: (a) relatif tidak ada biaya transaksi, (b) frekuensi berhubungan lebih cepat antara 1-3 kali dan

(c) lama pengurusan kredit antara 1-3 hari. Pedagang saprotan dan penggilingan padi menetapkan suku bunga rendah yaitu 24 persen per tahun, karena mereka mengutamakan hubungan kerjasama dalam pemasaran. Namun demikian pedagang saprotan secara tersembunyi akan menaikkan nilai jual pupuk dan obat yang dipinjam sedangkan penggilingan padi akan memainkan harga beli gabah ketika transaksi berjalan. Sekarang ini, tidak ada petani yang melakukan pinjaman kredit ke Bank keliling (*Bank jongkok*) karena tingkat bunganya tinggi (80 persen per tahun) dan pembayaran dilakukan secara harian.

Karakteristik Skim Kredit yang Diharapkan Petani

Lembaga kredit baik formal maupun informal di tingkat desa sangat penting untuk menutupi ketidakcukupan modal biaya usahatani dan kebutuhan lainnya. Pada kenyataannya petani lebih akses ke lembaga informal yang menyediakan suku bunga tinggi, sebaliknya petani kaya dan pelaku usaha besar lain seperti penggilingan padi, pedagang saprotan dan pedagang hasil dapat akses ke lembaga kredit formal yang menetapkan suku bunga rendah. Penomena ini sangat penting untuk dipelajari, membuat kebijakan-kebijakan agar petani kecil juga dapat akses ke lembaga formal yang menyediakan kredit dengan suku bunga rendah.

Syukur, *dkk.* (1990) menerangkan bahwa dalam menyusun skim kredit untuk petani kecil, lembaga pembuat kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik petani kecil sebagai pengguna seperti masih rendahnya dalam dukungan asset, produktivitas, ketrampilan fisik, pendapatan, pendidikan dan luas penguasaan lahan. Karena keterbatasan tersebut, karakteristik skim kredit yang ditawarkan harus berada dalam batas-batas kemampuannya seperti penetapan jenis agunan, bentuk kredit, periode kredit, cara pengembalian dan tingkat suku bunga kredit.

Table 4. Karakteristi Skim Kredit yang Diharapkan Petani Gurem

Karakteristik skim kredit	Persentase petani (%)
1. Jenis agunan	
Sertifikat lahan dan bangunan	0
Lainnya ¹⁾	100
2. Bentuk kredit	
Uang tunai	90
Input produksi	10
3. Lama kredit	
Jangka pendek (musiman)	100
Jangka panjang	0
4. Cara pengembalian	
Satu kali sesuai perjanjian	100
Bulanan	0
5. Tingkat suku bunga per tahun	
18 persen	85
24 persen	15

¹⁾ Barang bergerak: sepeda, TV, sepeda motor, perhiasan emas dll.

Tabel 4 menginformasikan bahwa sesuai dengan karakteristik petani dan usahatani padi, petani kecil mengharapkan kredit dengan agunan bukan sertifikat tanah tetapi bentuk barang bergerak (100%), kredit diberikan dalam bentuk uang (90%), periode kredit musiman (100%), cara pengembalian kredit satu kali setelah panen (100%) dan tingkat suku bunga kredit 18 persen per tahun (85%).

Jenis agunan. Salah satu penyebab yang menghalangi petani kecil akses ke lembaga kredit formal adalah mereka tidak mempunyai agunan jenis sertifikat tanah, hanya memiliki surat kepemilikan tanah "*girik*". Dengan demikian lembaga kredit agar menghindari penggunaan agunan sertifikat tanah, tetapi apabila terpaksa hendaknya dapat diwakili oleh sertifikat pengurus kelompok tani seperti pada kredit program. Agunan dalam bentuk barang bergerak seperti sepeda, TV dan perhiasan akan lebih mudah diakses petani.

Bentuk pemberian kredit. Sembilan puluh persen petani menginginkan pemberian kredit dalam bentuk uang tunai karena berdasarkan pengalaman pemberian kredit dalam bentuk sarana produksi sering menimbulkan kerugian, yaitu: (a) sering terjadi pengurangan dalam kuantitas atau kualitas pupuk dan obat-obatan, (b) keterlambatan dalam penyaluran dikarenakan masalah transportasi, dan (c) menyebabkan ketidaksesuaian antara jenis saprotan yang dikirim dengan kebutuhan tanaman di

lapangan, terutama jenis pupuk dan pestisida. Melalui kredit tunai, petani dapat mengelola sendiri dana yang ada dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan. Pemberian kredit uang tunai sudah diterapkan dalam program UPKD dan KKP.

Periode kredit dan cara pembayaran. Usahatani padi mempunyai siklus produksi musiman atau memberikan penerimaan semusim sekali. Sesuai dengan karakteristik usaha tersebut, seluruh petani menginginkan kredit jangka pendek (musiman) dan pembayaran dilakukan satu kali setelah padi di panen. Berbeda dengan pedagang, penggilingan padi dan pelaku agribisnis lainnya, usaha mereka dapat memberikan penerimaan tiap hari sehingga lembaga kredit yang menetapkan cara pembayaran bulanan dapat diakses.

Tingkat suku bunga. Delapan puluh lima persen petani menginginkan kredit dengan suku bunga antara 12 sampai 18 persen per tahun, sesuai dengan Kredit Likuiditas/Lunak Bank Indonesia (KLBI). Kredit program KKP dan UPKD menyediakan kredit dengan suku bunga masing-masing 18 persen dan 24 persen per tahun. Namun kredit murah saat ini sangat terbatas seiring dengan berlakunya Undang-Undang No.23/1999 tentang Bank Indonesia dan Letter of Intent (LOI) antara pemerintah Indonesia dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Pembiayaan pertanian tidak lagi sepenuhnya tergantung pada KLBI, tetapi lebih banyak mengandalkan kesediaan modal yang dimiliki lembaga keuangan perbankan dan non perbankan di dalam maupun di luar negeri dengan pola pengelolaan yang mengarah pada sistem pembiayaan komersial. Para petani pada umumnya akan mengurangi jumlah pinjaman apabila suku bunga kreditnya tinggi agar supaya jumlah pengembalian kredit masih berada di tingkat kemampuan usahanya. Ketika harga jual padi tinggi aksesibilitas petani terhadap kredit bunga tinggi akan meningkat.

Petani bijaksana akan mempertimbangkan baik potensi penerimaan maupun faktor resiko sebelum memutuskan berapa jumlah kredit akan dipinjam karena meminjam uang tanpa mempertimbangkan kemampuan pengembalian adalah keputusan yang salah. Sesuai dengan pendapat Richardson, *et al.* (1982) bahwa pengelolaan kredit yang baik membutuhkan sebuah pengetahuan tentang kredit, perencanaan usaha yang efisien, dan pembuatan keputusan yang bijaksana.

KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKAN

Kesimpulan

1. Kredit sudah menjadi bagian hidup dan ekonomi usahatani petani kecil, bila kredit tidak tersedia tingkat produksi dan pendapatan usahatani akan turun drastis. Dalam memenuhi pembiayaan usahatani, delapan puluh persen petani di samping menggunakan modal sendiri juga melakukan pinjaman kredit dan hanya dua puluh persen dapat memenuhi dengan modal sendiri.
2. Lembaga pendanaan yang paling banyak diakses petani berturut-turut adalah pedagang saprota (20%), penggilingan padi (20%), UPKD (16%), KKP (8%), pelepas uang (4%) dan pegadaian (5%). Sebenarnya kredit program sangat diminati petani, tetapi karena kemampuan keuangan pemerintah terbatas maka petani peserta program juga dibatasi.
3. Lembaga-lembaga kredit formal seperti BRI Unit Desa dan BPR sebenarnya menyediakan kredit dengan suku bunga rendah, tetapi petani kecil masih kurang akses dikarenakan tidak memiliki agunan sertifikat tanah, cara pembayaran bulanan tidak sesuai dengan tipe usahatani padi yang memberikan penerimaan musiman dan para petani pada umumnya belum familier dengan prosedur administrasi yang rumit. Akibatnya lembaga kredit formal hanya diakses oleh kelompok masyarakat ekonomi menengah ke atas seperti petani kaya, pemilik penggilingan padi, pedagang hasil, pedagang saprota dan lainnya. Sebaliknya petani kecil terpaksa hanya akses ke lembaga kredit informal yang menetapkan suku bunga kredit tinggi.

Saran Kebijakan

Dalam merancang skim kredit petani kecil, pelaku hendaknya mempertimbangkan karakteristik petaninya sebagai pengguna seperti masih rendah dalam tingkat pendidikan, dukungan aset, ketrampilan, produktivitas dan pendapatan usahatani sehingga skim kredit yang ditetapkan harus dalam batas-batas jangkauan kemampuan mereka. Sesuai dengan keterbatasan tersebut, petani kecil mengharapkan kredit dengan jenis agunan bukan sertifikat tanah karena mereka tidak memilikinya, tingkat suku bunga kredit antara 18 sampai 24 persen per tahun, kredit diberikan berupa uang tunai, periode kredit musiman dengan cara pengembalian satu musim sekali.

Petani hendaknya menggunakan kredit sesuai prinsip-prinsip pengelolaan kredit, yaitu: (a) gunakan kredit untuk tujuan-tujuan produktif, (b) batasi pinjaman terhadap perusahaan yang belum familier, (c) gunakan kredit untuk usaha yang memberikan penerimaan paling tinggi dalam batasan resiko yang rasional, (d) buat catatan-catatan yang baik agar pengelola usaha dan pemberi kredit dapat menganalisis secara objektif mengenai kebutuhan kredit, (e) menganalisis potensi usaha terutama aspek penerimaan dan kemampuan usaha untuk membayar kredit, (f) identifikasi beberapa lembaga kredit dan pilih salah satu yang memberikan skim kredit terbaik dan (g) buat kebijakan yang mendukung seperti kejujuran, terus terang dan serasi dalam berhubungan dengan pemberi kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Koperasi. 1978. Pedoman Pelaksanaan dan Pengembangan BUUD/KUD. Direktorat Jenderal Koperasi. Departemen Perdagangan dan Koperasi. 105 hlm.
- Mears, L.A. 1961. Rice Marketing in the Republic of Indonesia. The Institute for Economic and Social Research. Djakarta School of Economics, University of Indonesia. Special Edition for Bulog. P.T.Pembangunan, Djakarta. 477 pp.
- Mubiyarto. 1973. Pengantar Ekonomi Pertanian. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. PT.Repro Internasional, Jakarta. 274 hal.
- Richardson, W.B., William,G.C., and McVay,W.G. 1982. Managing the Farm and Ranch. Reston Publishing Company, Inc.. A Prentice Hall Company. Reston, Virginia. p.295-306.
- Suryana, A., S.Mardianto, and M.Ikhsan. 2001.Dinamika Kebijakan Perberasan Nasional: Sebuah Pengantar. *Dalam* A.Suryana dan S.Mardianto. *eds.* Bunga Rampai Ekonomi Beras. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia (LPEM-FEUI). 15 hlm.
- Syukur, M., S.Sumaryanto, C.Muslim, dan C.A.Rasahan. 1990. Pola Pelayanan Kredit untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Pedesaan Jawa Barat. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian. 75 hlm.
- Umali, D.L. 1978. Small farmers development manual. Volume I. Field action for Small Farmers, Small Fishermen, and Peasants. Regional Office for Asia and the Far East. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Bangkok, Thailand. p.138-144.